



RUNTUHNYA KERAJAAN PATANI: PEMBERONTAKAN RAKYAT MUSLIM SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH

¹Novita Ramadhani, ²Purwanto Putra, ³Khorun Nisa

¹Pendidikan IPS/Pendidikan Sejarah, Universitas Lampung, Indonesia

nv.vtaramdhni@gmail.com, purwanto.putra@fisip.unila.ac.id, khoirunnisaxz@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: ...-...-...

Disetujui: ...-...-...

Kata Kunci:

Kebijakan

Patani

Pemberontakan

Keywords:

Patani

Policy

Rebellion

ABSTRAK

Abstrak: Secara resmi diketahui, wilayah Pattani awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Siam dari Sukhothai dan Ayutthaya. Pada tahun 1767 setelah Ayutthaya runtuh, Patani mengalami masa damai yang penuh, akan tetapi di bawah Pemerintahan Raja Rama Thailand sekali lagi menjadi bagian dari Inggris. Pada akhir abad ke-18, kerajaan Patani ditaklukan oleh kerajaan Siam, akan tetapi pada saat itu kerajaan patani masih tetap bersifat otonomi dimana hanya dinaungi oleh Siam, hingga tahun 1909 kerajaan Patani resmi menjadi bagian integral dari kerajaan Siam setelah diadakannya perjanjian Bangkok tahun 1909 antara Kerajaan Siam dan British dengan mengabsahkan Patani menjadi bagian Siam, maka sejak saat itulah banyak terjadi perubahan-perubahan budaya, agama, bahasa, dan juga masyarakat Melayu di Patani mulai terancam. Dalam artikel ini, akan membahas mengenai faktor penyebab pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat muslim di Patani dan dampak pemberontakan rakyat terhadap kebijakan pemerintah.

Abstract: Officially known, the Pattani region was originally part of the Kingdom of Siam from Sukhothai and Ayutthaya. In 1767 after Ayutthaya collapsed, Patani experienced a period of complete peace, but under the King Rama's reign Thailand once again became part of the British. In the late 18th century, the kingdom of Patani was conquered by the kingdom of Siam, but at that time the kingdom of Patani was still remained autonomous where it was only shaded by Siam, until 1909. The kingdom of Patani officially became an integral part of the kingdom of Siam after the 1909 Bangkok Agreement between the Kingdom of Siam and the British, which legalized Patani as an integral part of the Kingdom of Siam by legalizing Patani to be part of Siam, so since then there have been many changes in culture, religion, and culture changes in culture, religion, language, and also the Malay community in Patani began to be threatened. In this article, we will discuss the factors the causes of the rebellion carried out by the Muslim people in Patani and the impact of the people's rebellion on government policy government policies.



<https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.ZZZ>



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

A. LATAR BELAKANG

Thailand atau yang nama lainnya *Muang Thai Risabdah* merupakan negara yang secara resmi tidak pernah dijajah oleh negara lain (Saifullah, 2010). Menurut dalam sejarah, negara ini masyarakat biasa

menyebutnya Siam. Ada empat belas Provinsi di wilayah selatan Thailand, diantaranya yaitu: Chumporn, Surathani, Ranong, Phangga, Songkhla, Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun. Dari segi Geografis, Thailand sangat mudah bagi para

pelancong dari suatu waktu ke waktu lain untuk mencari bimbingan atau inspirasi keagamaan.

Secara resmi diketahui, wilayah Pattani awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Siam dari Sukhothai dan Ayutthaya. Pada tahun 1767 setelah Ayutthaya runtuh, Patani mengalami masa damai yang penuh, akan tetapi di bawah Pemerintahan Raja Rama Thailand sekali lagi menjadi bagian dari Inggris. Dianeksasi oleh Kerajaan Siam di tahun 1909 sebagai bagian dari perjanjian pertukaran tanah dengan Kerajaan Inggris. Wilayah Yala dan Narathiwat yang pada mulanya bagian dari Patani, pada kenyataannya batal dipersatukan dan menjadi provinsi sendiri (Yuniarto P. R).

Islam masuk ke Patani pada abad ke-10 masehi melalui para pedagang dari jazirah Arab. Penduduk setempat dapat menerima ajaran Islam dengan baik tanpa paksaan. Kawasan Thailand yang banyak dihuni umat muslim adalah wilayah bagian Selatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kantong-kantong muslim di daerah Thailand Selatan diantaranya adalah provinsi Pattani, Yala, Satun, Narathiwat, dan Songkhla (Pitsuawan, 1989) di provinsi tersebut, rata-rata dihuni oleh sekitar 70 Hingga 80 persen muslim.

Selain itu, umat muslim juga tersebar di wilayah lain, seperti di provinsi Pattalung, Krabi, dan Nakorn Srithamm. Jatuhnya pemerintahan militer di tahun 1973, dan ditegakkannya demokrasi yang berlangsung hingga 1976 saat Jenderal Kriangsak Chomanan (Hasbullah, 2003). Dalam periode yang relatif demokratis, suara rakyat dipertimbangkan dalam menentukan kebijakan era baru dalam dunia politik Thailand. Hal ini tampak jelas dari semua keburukan sosial, ekonomi, politik yang cenderung menutup tutupi di bawah pemerintahan militer yang otoriter, mulai diangkat ke permukaan. Bentuk-bentuk keresahan penduduk, kekerasan politisi, perlawanan psikologis tanah, seringnya pelanggaran hukum dan ketertiban serta pemerintah yang tidak efektif di wilayah ini Tara, tampaknya pada umumnya adalah perwujudan fisik politik Thailand (Abdullah, 1988). Dengan segala perasaan tertekan yang ada dimasyarakat Melayu-Muslim.

Di bawah tekanan pembauran oleh mayoritas misalnya, mereka dipaksa mengambil nama-nama Thailand. Pemerintah mencoba menghancurkan sekolah-sekolah muslim dan menggantinya dengan sekolah Thai, Selain itu pemerintah mencoba menghancurkan pengaruh bahasa Melayu di kalangan muslim, tidak peduli terhadap perayaan-perayaan Islam, menganiaya, menahan dan kadang malah membunuh para pemimpin agama dan politik

muslim, sekitar 500 muslim dibunuh oleh pemerintah memaksa muslim untuk mengambil nama Thai yang non-Muslim demi menipiskan identitas Islam mereka (Kettani, 2005).

Pada 1875, masyarakat Islam Pattani mengadakan demonstrasi besar-besaran di berbagai kota di Pattani yang menuntut pemberian kesempatan yang lebih luas dan pembangunan yang lebih berimbang bagi Pattani. Berbagai kegiatan politik dari beberapa kelompok organisasi di daerah Siam bagian selatan, ancaman yang paling serius terhadap pemerintah adalah gerakan separatis yang beroperasi di daerah petani sementara mereka semua mengajar tujuan akhir yang sama pada, yakni pemerintahan sendiri. Terbentuknya berbagai kelompok militer yang secara terang-terangan bertujuan membebaskan daerah Melayu dari pemerintahan Thailand di mana gerakan separatis muslim ini memperjuangkan hak-hak Melayu muslim dan dilihat dari segala segisegi (Jamaludin, 1994)

Dulunya wilayah selatan bukan bagian dari Kerajaan Siam atau yang kita kenal sekarang Thailand. Wilayah bagian selatan dahulunya adalah Semenanjung Malaya yang mayoritas penduduknya beretnis Melayu. Orang-orang Melayu menganut agama Islam. Pattani adalah kerajaan yang berdiri serta memiliki sistem pemerintahan sendiri di Thailand selatan yang dikenal sebagai Kerajaan Pattani. Pattani adalah kerajaan Muslim yang berdaulat dan merdeka. Kerajaan ini memiliki struktur politik, sosial, budaya dan ekonominya sendiri, dan keluarga kerajaan serta masyarakat mengikuti aturan yang berlandaskan agama Islam. Pattani merupakan kerajaan makmur yang terkenal karena sebagai pelabuhan utama serta mendominasi perairan Asia Tenggara. Berkat lokasinya yang strategis, Pattani menjadi tempat peristirahatan atau pusat bisnis bagi para pedagang dari timur dan barat .

Pada akhir abad ke-18, kerajaan Patani ditaklukan oleh kerajaan Siam, akan tetapi pada saat itu kerajaan patani masih tetap bersifat otonomi dimana hanya dinaungi oleh Siam, hingga tahun 1909 kerajaan Patani resmi menjadi bagian integral dari kerajaan Siam setelah diadakannya perjanjian Bangkok tahun 1909 antara Kerajaan Siam dan British dengan mengabsahkan Patani menjadi bagian Siam, maka sejak saat itulah banyak terjadi perubahan-perubahan budaya, agama, bahasa, dan juga masyarakat Melayu di Patani mulai terancam. Penyebab terancamnya itu dikarenakan kerajaan Siam Chulalongkorn melakukan program reformasi

dalam sistem Thesaphiban (sistem perubahan negara Patani yang otonomi menjadi provinsi di bawah kekuasaan pemerintah pusat). Dengan bertujuan menghapus identitas dan agama orang-orang melayu Patani (Jehma et al., 2017) .

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan bahan-bahan berupa dokumen, buku, jurnal, catatan sejarah, majalah, reverensi lainnya, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dan lain-lain untuk mendapatkan jawaban dan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Menurut Zed (2003:3) dalam Supriyadi (2016:8), ia mengatakan bahwa studi sastra adalah serangkaian kegiatan penelitian dengan membaca dan mencatat bahan-bahan penelitian yang diperlukan. Berdasarkan kedua definisi tersebut, penelitian dokumenter adalah suatu metode yang dilakukan dengan cara menemukan atau menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang ingin kita lakukan

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor penyebab pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat muslim di Patani

Bergabungnya wilayah Patani dalam sistem pemerintahan Thailand tahun 1902 bukan hanya merupakan tindakan sentralisasi kekuasaan politik di Bangkok, namun hal tersebut lebih problematis dan destruktif adalah campur tangan fondasi masyarakat Islam dengan praktik Buddha-Thailand. Yang lebih penting upaya penghapusan Syariah (hukum Islam) dan adat Melayu (hukum adat Melayu), dimana menjadi dasar praktik Islam pada kehidupan sehari-hari. Sebelum bergabung wilayah Patani Raya tersebut dipimpin oleh seorang Sultan Melayu (raja). Pemberontakan Islam, terjadi akibat ketidakseimbangan kekuatan ekonomi dan politik kemiskinan, serta masalah keuangan juga disebut-sebut menjadi salah satu faktor di balik konflik masyarakat Thailand selatan. Secara umum, pendidikan masyarakat Melayu islam jauh lebih rendah dibandingkan masyarakat penganut agama Buddha. Di Thailand bagian selatan, bahasa Thai menjadi bahasa pengantar di semua sekolah, hal ini menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, akibatnya ada yang tidak menyekolahkan anaknya karena

penggunaan bahasa Thai tersebut (Irham Nuerang, 2016).

Faktanya, keadaan sosial politik di Patani merupakan situasi konflik antara masyarakat Muslim-Melayu dengan kerajaan Siam yang berpendirian terhadap kepercayaan negara Budha. Dari segi historis, permasalahan tersebut terjadi pada masa perluasan wilayah Kerajaan Siam di bagian selatan (Pattani, Yala, Narathiwat, Songkhla dan Satun) yang merupakan bagian kerajaan Patani yang sudah terpecah. Perluasan tersebut mengakibatkan bagian Selatan secara resmi berada di bawah kekuasaan Pemerintah Kerajaan Siam pada tahun 1909. Kemudian di tahun yang sama, ditandatangani Perjanjian Anglo-Siam yang menghapuskan hak Muslim Melayu di Patani. Akibatnya dari traktat tersebut maka timbullah perlawanan dari kelompok minoritas Melayu Muslim yang berkelanjutan sampai waktu yang lama bahkan semakin agresif sehingga perlawanan itu dianggap aksi separatis yang kemudian diberlakukannya darurat militer (Supriati H. Rahayu, 2022).

Dilihat dari segi historis, permasalahan politik, budaya, dan hukum di kawasan tersebut sangat lah dinamis. Sebelumnya Pattani ini merupakan kesultanan islam yang merdeka, yang kemudian dianeksasi ke Kerajaan Siam sejak awal abad ke-19. pada saat Siam menjadi monarki konstitusional dengan nama resmi Thailand pada tahun 1932, Pattani berubah menjadi provinsi di bawah yurisdiksi negara Thailand. Setelah menjadi bagian dari provinsi Thailand ini terjadinya dinamika serta pergulatan. Budaya lokal mereka yang sudah ada dari akulturasi Islam dan budaya Melayu, secara paksa diakulturasi dengan budaya baru yaitu budaya Thai. Terdapat perbedaan yang mendasar antara kedua budaya ini yang sulit untuk diintegrasikan. Oleh karena itu, timbullah pemberontakan di kalangan masyarakat Patani terhadap segala upaya integrasi dan asimilasi yang dilakukan pemerintah Thailand (Sodiqin, 2016).

Sejak integrasi Pattani menjadi bagian Kerajaan Siam (Thailand), hal tersebut menyebabkan perubahan dalam sistem serta struktur sosial

masyarakat. Masyarakat Muslim Pattani yang duhulunya merupakan mayoritas di bagian wilayah mereka, lalu menjadi masyarakat yang minoritas dibawah kekuasaan Siam. Masyarakat muslim Pattani menjadi warga minoritas yang merasa terintimidasi oleh militer. Integrasi yang dilakukan oleh pemerintah siam (Thailand) tersebut dari sistem pendidikan, politik, budaya, dan juga hukum. Kebijakan tersebut menuai protes keras dari masyarakat Muslim Melayu. Serta masyarakat Pattani dijuluki sebagai “khaek”, artinya pendatang, dan disebut juga “jon Bang yak dindan”, yang mempunyai arti seperti separatis atau bandit, karena tidak diakui oleh masyarakat Thai serta dianggap orang luar.

Posisi budaya minoritas Pattani berarti posisinya akan selalu berada di bawah budaya mayoritas Thai. Pemerintah Thailand dengan didukung kekuatan politik serta militernya, secara agresif menerapkan kebijakan asimilasi melalui jalur pendidikan, hukum, budaya dan juga politik. Berdasarkan ideologi “nation, king, and religion”, pembangunan bangsa dikembangkan dengan tujuan untuk menundukkan seluruh komponen masyarakat pada satu kewarganegaraan, yakni Thai. Ideologi nasionalisme tersebut merupakan ideologi Siam (Thai-Buddha) dan Pattani (Melayu-Islam). Masyarakat Pattani menganggap bahwa setiap integrasi/asimilasi yang dilakukan pemerintah sebagai upaya dekulturasi budaya Melayu-Muslim. Bagi Masyarakat Muslim Pattani melestarikan serta melindungi identitas komunitas Pattani merupakan jihad keagamaan Masyarakat Patani melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah tersebut adalah bagian dari upaya mereka melindungi identitas etnis dan agama mereka. Ada kekhawatiran historis Muslim Melayu akan dilupakan masyarakat jika kurikulum Thai dimasukkan ke dalam sistem kurikulum pendidikan (Sodiqin, 2016)

Pemerintah Siam (Thailand) membentuk sistem pendidikan nasional tahun 1932, dengan tujuan menyatukan seluruh kelompok agama dan etnis menjadi satu kesatuan negara berdasarkan kebijakan politik baru. Peraturan tersebut

menekankan pada dua aspek yakni kebebasan serta kesetaraan. Dari segala cara pemerintah untuk melakukan perubahan sejarah nasional Siam serta menetapkan bahasa Thai menjadi bahasa resmi. Masyarakat Melayu tidak menerima kebijakan tersebut dimana dapat menyebabkan hilangnya bahasa Melayu. Alasan dari penolakan tersebut disebabkan oleh dua hal: pertama, bahasa Thai wajib digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dimana hal tersebut menjadi ancaman terhadap eksistensi bahasa Melayu. Bagi masyarakat Melayu bahasa Siam merupakan bahasa asing yang tidak mereka gunakan di kehidupan sehari-hari. Diberlakukannya bahasa berbeda di dalam sekaligus di luar sekolah menyebabkan siswa kebingungan. Kedua, tidak ada tempat untuk belajar Islam. Sebab, Thailand identik dengan agama Buddha, dimana uraian bahan ajarnya dinilai merupakan upaya untuk memasukkan ajaran Buddha dalam pendidikan Islam. Akibat dari penolakan tersebut, sekolah Muslim tidak diberikan dana pendidikan. Tidak hanya itu, jika tidak mengikuti kurikulum pemerintah maka tidak terdaftar di kementerian pendidikan, hal tersebut mengakibatkan sulitnya mendapatkan pekerjaan bagi lulusan sekolah Muslim.

Proses integrasi tersebut puncaknya terjadi ketika pemerintahan perdana menteri Phibul Songkran, dimana ia mengubah nama Kerajaan Siam menjadi Kerajaan Thailand tahun 1939 M. Perubahan nama itu tak hanya berdampak pada nama kerajaan saja, namun juga berdampak pada aspek etnis dan bahasa kesatuannya yang nantinya akan menjadi bangsa dan bahasa yang dominan, yakni bangsa dan bahasa Thai. Adanya perubahan ini semakin membuat masyarakat cemas karena hal tersebut dapat mengancam akan terhapusnya identitas Melayu serta identitas Muslim sepenuhnya dengan keluarnya Rattaniyom, merupakan kebijakan untuk masyarakat minoritas dengan tujuan nasionalisasi dengan siamisasi yakni “mensiamkan” rakyat Melayu serta tionghoa (Jamaludin, 1994).

Terdapat 12 pasal dalam kebijakan Rattaniyom. Dari 12 pasal tersebut, terdapat tiga pasal yang

secara langsung mendesak masyarakat melayu, yaitu Rathaniyom Pasal 3, Pasal 9 dan Pasal 10, dari segi berpakaian, semua rakyat Negara diharuskan memakai pakaian seperti orang Eropa. Rathaniyom Pasal 3 memiliki nama panggilan Thai, Rathaniyom Pasal 9 Bahasa Thai serta memiliki tanggung jawab sebagai warga negara yang baik maka wajib mempelajari bahasa Thai karena itu merupakan bahasa negara. Rakyat Melayu Patani masih menganggap bahasa Thai sebagai bahasa asing dan bahasa agama Buddha. Selain itu, penggunaan bahasa Melayu dilarang dalam pengajian dimana kegiatan itu merupakan amalan sehari-hari mereka. kebijakan tersebut membuat orang Melayu membenci pelajaran bahasa Thai.

Kebijakan rathaniyom oleh Phibun Songkhram 1938, Minoritas harus tunduk pada segala bentuk budaya-budaya Thai. siamisasi tersebut dibentuk dengan upaya untuk mencintai negara. Jika ingin masuk ke sekolah pemerintahan atau melamar pekerjaan di instansi pemerintahan wajib menggunakan atau memiliki nama Thai. Penggunaan atau pengajaran bahasa Melayu dilarang di sekolah-sekolah negeri atau ketika berbicara dengan pejabat pemerintah. Rezim Phibun ini tak hanya menindas minoritas Melayu tetapi juga minoritas Tionghoa. Kewajiban menggunakan bahasa dan aksara Thai ini menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat di Thailand bagian selatan yang tidak bisa berbahasa Thai karena selama ini selalu menggunakan bahasa Melayu. Sehingga hal tersebut menyebabkan menipisnya peluang mereka mendapatkan kerja. Minoritas Melayu dan Tionghoa, jika ingin bekerja sebagai pejabat pemerintahan, harus mengganti namanya terlebih dahulu menjadi nama Thai. Hal ini menyebabkan diskriminasi terhadap Muslim Thailand dan membatasi kebebasan mereka dalam bermasyarakat. Kebijakan asimilasi ini menyebabkan masyarakat Melayu Muslim Patani khususnya orang muslim melepaskan identitas, bahasa, dan budaya Melayu mereka menjadi identitas, bahasa, dan budaya Thailand (Fitriani et al., 2021).

Kebijakan pemerintah Thailand terhadap bahasa Melayu berubah-ubah sesuai dengan arus

politik yang ada. Sejak awal Patani menjadi bagian dari Siam hingga saat ini, bahasa Melayu selalu menjadi topik permasalahan hangat dan menjadi perdebatan. Hingga tahun 1940-an Siam (Thailand) dipimpin oleh Perdana Menteri Phibun Songkram, ia menerapkan kebijakan dasar Rathaniyom Thai.

Dasar-dasar ini termasuk diantaranya:

- Melarang institusi pendidikan pondok mengajar dalam bahasa Melayu karena bahasa itu bukan bahasa resmi negara ini.
- Menutup institusi-institusi pendidikan agama Islam yang mengajar dalam bahasa Melayu.
- Melarang orang Melayu bercakap bahasa Melayu.
- Memaksa orang Melayu menukarkan nama Melayu kepada nama Siam.
- Menukarkan nama-nama kampung dalam bahasa Melayu ke dalam bahasa Siam di seluruh wilayah Melayu.
- Berusaha menimbulkan kesulitan kepada orang Melayu yang bercakap Melayu apabila berurusan di pejabat-pejabat kerajaan.
- Melarang orang-orang Melayu memakai pakaian Melayu.

2. Dampak Pemberontakan Rakyat Terhadap Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Siamisasi ditentang keras oleh masyarakat Patani. Dimana Haji Sulong yang menjadi ketua, ia terkenal dengan tujuh tuntutan. Karena tuntutan tersebut, Haji Suron dianggap pemberontak oleh kalangan Siam (Thailand) dan kemudian meninggal secara misterius. Tuntutan tersebut mengubah banyak kebijakan politik di Negara Thailand, khususnya mengenai bahasa Melayu. Tahun 1950-an, pemerintah Thailand kembali mengizinkan pengajaran bahasa Melayu di sekolah-sekolah milik Kerajaan, dengan mengimpor guru-guru bahasa Melayu dari Malaysia dan Singapura. Pada tahun 1960 M, Kerajaan mulai ikut campur kembali dalam urusan sekolah pondok di Patani. Kerajaan telah mulai menawarkan bantuan keuangan untuk sekolah pondok yang terdaftar, namun dengan syarat sekolah tersebut memasukkan mata pelajaran bahasa Siam/Thailand ke dalam kurikulum sekolah pondok tersebut (Jehma et al., 2017).

Keberanian Haji Sulong dalam Menentang Pemerintahan tersebut menginspirasi sehingga perlawanan tidak pernah padam. Tengku Abdul Jalil mendirikan Barisan Pembebasan Pattani tahun 1959. Perlawanan lain didirikan tahun 1980 adalah Barisan Revolusi Nasional (BRN), yang didirikan dengan bertujuan untuk mendirikan Republik Islam Pattani. Selain itu berdiri PULO (Pattani Union Liberation Front). Semua organisasi perlawanan ini dikendalikan oleh MPR MP (Council of the Muslim People of Pattani). Dari perlawanan-perlawanan ini pemerintah Thailand terpaksa mengubah kebijakannya kepada Pattani. Tahun 1997, pemerintah menerapkan kebijakan pro-Muslim dengan mengizinkan perempuan Muslim mengenakan hijab di foto paspor dan kantor pemerintah, jam khusus dan berbeda bagi laki-laki untuk melaksanakan shalat Jumat, pelaksanaan ritual keagamaan dan libur untuk hari raya. Selain itu, pemerintah memberi fasilitas beribadah haji, mengeluarkan sertifikat halal, mengakui keberadaan syekh muslim (Chularajmontri) dan memberdayakan Komite Islam Pusat dan Dewan Islam Provinsi. Pada bidang politik, peran masyarakat Muslim di parlemen Thailand juga meningkat, terutama dari segi jumlah. Akan tetapi kebijakan-kebijakan tersebut sedikit berubah ketika Thaksin Sinawatra menjadi perdana menteri, dimana pada tahun 2001 otonomi provinsi-provinsi di Thailand bagian selatan dihapus (Sodiqin, 2016).

Pada kebijakan politik Thailand kepada masyarakat Melayu di Patani ada satuan khusus yang diorganisasikan ke dalam wilayah-wilayah penting untuk memantau guna menjaga keamanan nasional, yaitu Sektor Militer Selatan Kong Thap Pak Ti Si (Divisi Angkatan Darat ke-4) dan Pemerintah Daerah bagian Selatan. badan khusus Sun Amnuia Karn Boriharn Sam Cangwad Cai Dean Pak Tai (Pusat Administrasi Tiga Provinsi Perbatasan Thailand Selatan) didirikan. Tindakan yang dilakukan pemerintah Thailand kepada masyarakat Melayu di Patani, memberikan kebebasan dan keleluasaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dan budaya, membuah hasil serta kesan yang mendorong masyarakat Melayu di Patani bersikap pro-pemerintah dan terbuka. Pemerintah Thailand menawarkan bantuan untuk masalah yang berkaitan

dengan kegiatan keagamaan serta budaya. Program tersebut dibuat oleh pemerintah Thailand dengan upaya untuk mendukung kegiatan keagamaan dan budaya.

Pemulihan perdamaian di Thailand bagian selatan ini disusul dengan diberinya otonomi khusus kepada Thailand selatan serta pembayaran subsidi tambahan dari Thailand pusat untuk wilayah Patani dengan hal tersebut dapat memperhatikan kepentingan masyarakat Melayu di Patani. Harapannya masyarakat tidak akan memberontak lagi. Meskipun awalnya terlihat begitu menjanjikan, berbagai kebijakan dari pemerintah tersebut tidak ditindaklanjuti dengan perbaikan kualitas infrastruktur yang lebih memadai, integrasi masyarakat lokal Patani ke dalam birokrasi, atau pengurangan pengangguran di Thailand selatan.

Berbagai usaha pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Patani yaitu, Dibentuknya Komisi Rekonsiliasi Nasional tahun 2004 (National Reconciliation Commission). Pembentukan Komisi Rekonsiliasi Nasional ini membawa serta memediasi perdamaian untuk Thailand selatan. Peran militer yang kuat di Thailand selatan menyebabkan banyak rekomendasi komisi tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan lancar. Masyarakat Melayu di Patani masih kekurangan akses gratis terhadap pendidikan, pekerjaan dan layanan pemerintah lainnya.

Tahun 2005 Pemerintah Thailand mengumumkan darurat militer yang diterapkan di tiga provinsi, yaitu Patani, Narathiwat, dan Yala. Undang-undang keamanan dan darurat negara yang terkait dengan pemerintah Thailand mengarahkan pasukan militer untuk melawan pemberontak di Thailand selatan. penindasan terhadap demokrasi, hak asasi manusia dan keadilan di Thailand selatan, menurut pasal 44 undang-undang tersebut, militer memiliki hak untuk menghukum masyarakat yang menjadi ancaman keamanan nasional negara dan menghina kerajaan. Pendapat masyarakat Patani undang-undang darurat terhadap warga sipil tersebut banyak masyarakat Patani yang diculik, disiksa, serta dibunuh. Dari kekerasan tersebut 80% korban adalah warga sipil, Setiap harinya ada warga

Patani yang ditembak oleh tentara. Komisi rekonsiliasi Nasional justru membuat konflik memanas. Pemerintahan dinilai dengan sengaja meningkatkan konflik. Di sisi lain pula kelompok separatis juga tidak ingin konflik berakhir, karena jika konflik terus berlanjut, maka semakin banyak pula dana dari pemerintah pusat untuk pemerintahan Thailand selatan (Irham Nuerang, 2016)

D. SIMPULAN DAN SARAN

Sejak integrasi Pattani menjadi bagian Kerajaan Siam (Thailand), hal tersebut menyebabkan perubahan dalam sistem serta struktur sosial masyarakat. Masyarakat Muslim Pattani yang duhulunya merupakan mayoritas di bagian wilayah mereka, lalu menjadi masyarakat yang minoritas dibawah kekuasaan Siam. Masyarakat muslim Pattani menjadi warga minoritas yang merasa terintimidasi oleh militer dan politik. Pemerintah Siam (Thailand) membentuk sistem pendidikan nasional tahun 1932, masyarakat Melayu tidak menerima kebijakan tersebut dimana dapat menyebabkan hilangnya bahasa Melayu. Kebijakan pemerintah Thailand terhadap bahasa Melayu berubah-ubah sesuai dengan arus politik yang ada. Sejak awal Patani menjadi bagian dari Siam hingga saat ini, bahasa Melayu selalu menjadi topik permasalahan hangat dan menjadi perdebatan. Tindakan yang dilakukan pemerintah Thailand kepada masyarakat Melayu di Patani, memberikan kebebasan dan keleluasaan untuk berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan dan budaya, membuahkan hasil serta kesan yang mendorong masyarakat Melayu di Patani bersikap pro-pemerintah dan terbuka. Pemerintah Thailand menawarkan bantuan untuk masalah yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan serta budaya

REFERENSI

- Fitriani, Z., Studi, P., Peradaban, S., Sejarah, J., Sastra, D. A. N., Ushuluddin, F., & Dan, A. (2021). *Dinamika Sosial Minoritas Muslim*.
- Irham Nuerang. (2016). Dinamika Bernegara Masyarakat Muslim Thailand Selatan Dalam Perspektif Sosiologi Politik Islam. *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 5(2), 9–10.
- Jamaludin. (1994). *Syabbuddin Mangandaralam, Thailand Negara Gajah Putih (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994)*, h.19 57. 3, 57–66.

- Jehma, R., Sumardi, & Sugiyanto. (2017). The nationalism movement of Islam for independence of Patani Southern Thailand (1902-1945). *Jurnal Historica*, 1(1), 1–14.
- Sodiqin, A. (2016). HUKUM ISLAM DAN BUDAYA LOKAL DI MASYARAKAT MUSLIM PATTANI THAILAND (Integrasi, Konflik dan Dinamikanya). *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 14(1), 31–50. <https://doi.org/10.24090/ibda.v14i1.524>
- Supriati H. Rahayu, D. (2022). *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*. 12, 119–132.